

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Kebijakan desentralisasi fiskal secara resmi dimulai pada tahun 2001. Penetapan tersebut diawali dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (PKPD). Hingga kini, kedua regulasi tersebut sudah mengalami beberapa kali revisi hingga yang terakhir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Pembentukan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagai upaya memenuhi tuntutan dan tindak lanjut penyelenggaraan otonomi daerah melalui desentralisasi fiskal. Kenyataan bahwa kondisi dan kemampuan setiap daerah tidaklah sama maka negara perlu berperan untuk memastikan penyelenggaraan otonomi daerah dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Diantaranya melalui perimbangan keuangan dan peningkatan kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan asli daerahnya.

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia pengertian tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Dengan adanya otonomi daerah setiap daerah diberikan keleluasaan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya sesuai dengan tujuannya yaitu untuk mewujudkan kemandirian daerah sehingga daerah bebas untuk mengatur dirinya tanpa ada campur tangan pemerintah pusat dan juga memiliki tujuan lainnya agar dapat memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada publik dan juga agar masyarakat dapat dengan mudah mengontrol kinerja pemerintah sehingga pemerintah terus memperbaiki kinerjanya.

Berdasarkan Undang-Undang dan Regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait implementasi otonomi daerah, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Kebijakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sendiri memiliki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah dalam pelaksanaan program perencanaan pembangunan di suatu daerah. Namun demikian APBD secara teknis dipakai sebagai instrumen dalam menentukan target pencapaian pendapatan dan pengeluaran. Dengan demikian akan membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, pengesahan dalam pengeluaran, serta sebagai sumber pengembangan untuk evaluasi kinerja, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai satuan kerja pemerintah daerah. APBD mempunyai peran yang sangat vital dalam suatu pembangunan daerah. Karena mencerminkan bagaimana suatu daerah dapat menggali dan mengelola potensi sumber pendapatan serta mendistribusikan pendapatan tersebut untuk belanja dan pembiayaan daerah secara cepat dan merata.

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, penyerahan, pelimpahan dan penugasan urusan pemerintahan kepada Daerah secara nyata dan bertanggung jawab harus di ikuti dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil, termasuk perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan vertikal antara pusat dan daerah melalui penyediaan dana perimbangan. Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan juga berupaya mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah. Hal ini dikarenakan pemberian dana perimbangan disesuaikan dengan kondisi wilayah yang ada. Alokasi dana perimbangan yang disiapkan pemerintah pusat meliputi dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK). Sayangnya, dana perimbangan juga menjadi celah bagi daerah untuk terus mengajukan pemekaran wilayah yang artinya kebutuhan dana perimbangan akan terus meningkat dan akan semakin membebani APBN (Firdausy:2018).

Mengatasi permasalahan tersebut maka sesuai dengan Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah, daerah diberi keleluasaan untuk menggali potensi dan sumber pendapatan asli daerahnya. Hal tersebut akan mendorong pemerintah daerah untuk memiliki tingkat kemandirian keuangan daerah yang tinggi dengan harapan akan memperkecil tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat

melalui dana perimbangan. Dengan meningkatnya pendapatan asli daerah yang diperoleh oleh pemerintah daerah maka akan mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah. Semakin tinggi pendapatan asli daerah yang diterima oleh pemerintah daerah maka tingkat kemandirian keuangan daerah akan semakin meningkat begitupun sebaliknya. Tingginya tingkat kemandirian keuangan daerah bukan berarti pemerintah daerah sudah tidak perlu memperoleh dana perimbangan, karena dana perimbangan tetap diperlukan untuk mempercepat pembangunan daerah. Berikut merupakan penerimaan Dana Perimbangan Provinsi Jawa Barat tahun 2010-2014.



Sumber: <https://jabar.bps.go.id> (data diolah)

**Gambar 1. 1**  
**Dana Perimbangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2014**

Pada gambar diatas jelas terlihat bahwa penerimaan Dana Perimbangan Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan secara signifikan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan Dana Perimbangan Provinsi Jawa Barat tergolong cukup tinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat memiliki tingkat ketergantungan yang cukup tinggi terhadap

Pemerintah Pusat dan berarti tingkat kemandirian keuangan daerahnya masih tergolong rendah.

Kemandirian keuangan bagi daerah otonom sangatlah penting, mengingat makna dari kebijakan tersebut adalah bagaimana daerah yang berjuang tidak saja memperoleh kewenangan, namun harus bertanggung jawab memperoleh berbagai pendanaan untuk menjalankan roda pembangunan dan pemerintahan. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan dengan besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain seperti bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman, selain pendapatan asli daerah kemandirian keuangan daerah dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya yaitu dana perimbangan yang meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Tingkat kemandirian keuangan daerah di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. 1**  
**Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2014**

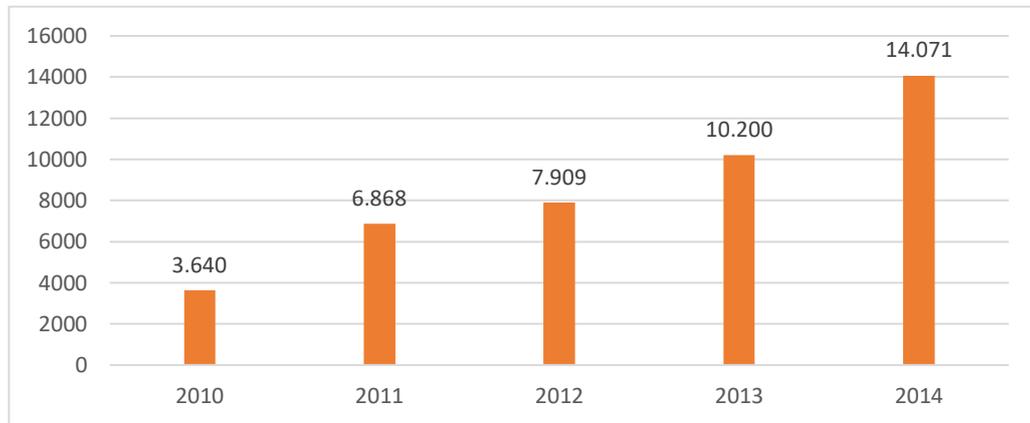
<b>Tahun</b>	<b>Presentase</b>	<b>Kemampuan Keuangan Daerah</b>	<b>Pola Hubungan</b>
2010	15,40%	Rendah Sekali	Instruktif
2011	23,48%	Rendah Sekali	Instruktif
2012	25,85%	Rendah	Konsultatif
2013	31,13%	Rendah	Konsultatif
2014	39,81%	Rendah	Konsultatif
<b>Rata – Rata</b>	<b>27,13%</b>	<b>Rendah</b>	<b>Konsultatif</b>

Sumber: <https://jabar.bps.go.id> (data diolah)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa tingkat kemandirian keuangan seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2010-2014 sebesar 27,13% hal ini berarti bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah nya masuk kedalam kategori pola konsultatif. Pola konsultatif sendiri berarti bahwa campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang terhadap pemerintah daerah dan lebih banyak pada memberi konsultasi kepada daerah, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerahnya. Dalam hal ini pemerintah daerah seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat sudah dianggap sedikit lebih mampu untuk melaksanakan otonomi daerahnya sendiri.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah salah satunya adalah pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah ini mencerminkan kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhannya sendiri dan merupakan pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah. PAD merupakan salah satu komponen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) semakin tinggi tingkat Pendapatan Asli Daerah yang diterima daerah maka tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat dalam hal pendanaan APBDnya akan semakin berkurang. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, yang dimaksud dengan PAD adalah Pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi

daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Berikut merupakan data Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2014.



Sumber: <https://jabar.bps.go.id> (data diolah)

**Gambar 1. 2**  
**PAD Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2014**

Dapat dilihat dari gambar diatas bahwa penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 setiap tahunnya mengalami peningkatan secara signifikan. Pada Tahun 2010 pendapatan asli daerah sebesar 3,640 T, tahun 2011 sebesar 6,866 T, tahun 2012 sebesar 7.909 T, tahun 2013 sebesar 10,200 T dan tahun 2014 sebesar 14,071 T. Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Barat berpotensi untuk menghasilkan penerimaan daerah yang tinggi yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah guna untuk menjadikan daerahnya mandiri secara finansial dan diharapkan mampu membiayai segala kebutuhan daerahnya sendiri sehingga dapat mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

Citra keuangan pemerintah daerah (pemda) akan tercermin dari besarnya PAD yang diperoleh, dan bagaimana alokasi keuangan Pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakatnya. Untuk

meningkatkan Penerimaan PAD, Pemerintah daerah perlu melakukan analisis potensi-potensi yang ada di daerah dan mengembangkan potensi tersebut sebagai pemasukan daerah. Pengembangan potensi akan menciptakan PAD yang berguna bagi pelaksanaan tujuan pembangunan. Pengelolaan PAD yang efektif dan efisien perlu dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah maupun perekonomian nasional. Kontribusi yang dicapai dari PAD dapat terlihat dari seberapa besar pendapatan tersebut disalurkan untuk membangun daerah agar lebih berkembang dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dilihat dari komponen Pendapatan Asli Daerah secara rata-rata yang mempunyai kontribusi paling besar yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Oleh karena itu kemampuan dari aparaturnya pemerintah daerah sangat diperlukan guna merencanakan, melaksanakan, mengelola, menggali serta melaporkan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah khususnya pada bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah. Pendapatan ini seringkali dijadikan indikator kemajuan suatu daerah. Daerah yang dianggap maju adalah daerah yang memiliki PAD yang tinggi. Hal ini dapat dimengerti karena dengan tingginya PAD yang diterima suatu daerah maka tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat dalam hal pendanaan APBDnya akan semakin berkurang. Walaupun demikian, pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan-pungutan kepada masyarakat yang dapat berakibat biaya ekonomi tinggi (*high cost*

*economy*) yang pada akhirnya kurang mendukung dunia usaha atau investasi. Selain itu, pemerintah daerah juga dilarang menetapkan peraturan daerah yang menghambat mobilitas penduduk.

Dalam penelitian ini menunjukkan beberapa faktor komponen PAD yang dapat mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah. Faktor pertama yang mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah adalah pajak daerah. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang sangat potensial dalam menyumbang sisi penerimaan daerah, pajak daerah yaitu iuran wajib dari rakyat kepada pemerintah daerah sebagai wujud peran serta dalam pembangunan, yang pengenaannya didasarkan pada Undang-Undang dan tidak mendapat imbalan secara langsung, serta dapat dipaksakan kepada mereka yang melanggarnya. Pajak daerah sebagai salah satu penerimaan pendapatan asli daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Sebagai salah satu komponen penerimaan pendapatan asli daerah yang kontribusinya paling besar, potensi pungutan pajak daerah lebih banyak memberikan peluang bagi daerah untuk dimobilisasi secara maksimal bila dibandingkan dengan komponen-komponen penerimaan pendapatan asli daerah yang lainnya. Penerimaan pajak daerah yang semakin meningkat di dalam suatu daerah maka hal itu menunjukkan bahwa terjadi peningkatan terhadap pendapatan asli daerah yang berarti akan berdampak pula pada peningkatan kemandirian keuangan daerah.

Faktor kedua yang juga mempengaruhi kemandirian keuangan daerah adalah retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan penerimaan terbesar kedua setelah pajak daerah dalam penerimaan pendapatan asli daerah. Berbeda dengan pajak daerah yang pungutannya dapat dipaksakan, retribusi daerah hanya dapat dikenakan apabila pemerintah daerah memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat atau pemerintah daerah memberikan izin untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Sebagai salah satu komponen pendapatan asli daerah, retribusi daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Untuk meningkatkan pendapatan dari retribusi, daerah harus memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan retribusi memiliki sifat iuran berdasarkan pelayanan jasa yang diberikan daerah langsung kepada masyarakat yang mendapatkan manfaat. Maka dari itu semakin meningkatnya penerimaan daerah yang berasal dari retribusi daerah maka akan meningkatkan penerimaan asli daerah dan tingkat kemandirian keuangan daerah juga akan meningkat.

Faktor ketiga yang mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Berbeda dengan pajak daerah dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan kekayaan daerah yang pengolahannya terpisah dari APBD. Adanya

kekayaan daerah yang dipisahkan ini antara lain karena investasi pemerintah daerah pada badan usaha, baik perusahaan milik negara/daerah (BUMN/BUMD) maupun perusahaan milik swasta. Selain pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah juga diberi kewenangan untuk mengelola kekayaan daerah yang dipisahkan. Apa yang diperoleh dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain adalah bagian laba, deviden dan penjualan saham milik daerah. Investasi daerah yang berupa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tersebut diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan APBD. Jika atas pengelolaan tersebut memperoleh laba maka laba tersebut akan dimasukkan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Dengan meningkatnya pendapatan asli daerah dan tingkat kemandirian keuangan daerah juga akan meningkat.

Hal tersebut diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizka (2016) menyebutkan bahwa penerimaan daerah akan dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasional pemerintah daerah. Semakin tinggi penerimaan daerah maka akan semakin tinggi pula tingkat kemandirian keuangan daerah. Sedangkan menurut Muhamad & Widhi (2018) Pendapatan Asli Daerah terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah, peningkatan atau penurunan PAD itu sendiri dipengaruhi oleh dimensi atau komponen dari PAD tersebut. Dalam penelitian ini komponen PAD yang digunakan adalah Pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, disimpulkan bahwa pengelolaan penerimaan daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah dan hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan akan mempengaruhi peningkatan bahkan penurunan PAD. Jika penerimaan tersebut dikelola dengan baik maka PAD akan meningkat dan tingkat kemandirian keuangan daerah pun akan ikut meningkat.

Penelitian terdahulu yang serupa telah banyak dilakukan seperti penelitian yang dilakukan oleh Rizka (2016) menyebutkan bahwa hasil penelitian Pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain PAD yang sah dan dana bagi hasil pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Endra Gunawan (2018) menyebutkan bahwa hasil penelitian menunjukkan Efektivitas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Kemudian penelitian yang dilakukan Feni dan Muhammad (2019) menyebutkan bahwa hasil penelitian Secara simultan baik pajak daerah maupun retribusi daerah mempunyai pengaruh signifikansi positif terhadap tingkat kemandirian daerah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sunarto dan Y Sunyoto (2016) menyebutkan bahwa hasil penelitian Pajak Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Kemandirian Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi. Retribusi Daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap Kemandirian Daerah dan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Kemandirian Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Maya dan Lita (2019) Hasil dari penelitian ini adalah pajak daerah, retribusi daerah, dan belanja modal berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Sedangkan DBH dan pertumbuhan ekonomi tidak

berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Secara silmutan pajak daerah, retribusi daerah, DBH, belanja modal, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Yusuf dan Romadhon (2020) Memperoleh hasil penelitian variabel pajak daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Variabel hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Variabel retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Variabel lain-lain pendapatan daerah yang sah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Fadly, Harijanto, dan Victorina (2016) Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel Pajak Daerah berpengaruh secara signifikan positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah dengan nilai signifikansi 0,000 dan untuk variabel Retribusi Daerah juga berpengaruh secara signifikan positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah dengan nilai signifikansi 0,006. Kemudian secara simultan variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah.

Selain itu penelitian oleh Rina Kurnia (2010) memperoleh hasil yaitu belanja modal berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah sedangkan DAU tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Putri Ika Sari (2015) menunjukkan hasil penelitian bahwa DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, DAK berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah dan belanja modal berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Penelitian yang

dilakukan oleh Renny Nur'ainy, Desfitriana, dan Rooshwan Budi Utomo (2013) Hasil penelitian membuktikan bahwa secara parsial pertumbuhan ekonomi (PDRB) dan asli daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Secara simultan dua faktor yang terdiri dari pertumbuhan ekonomi (PDRB) dan pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Nareswari dan Sri (2018) Hasil penelitian ini menunjukkan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan belanja modal secara simultan berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Secara parsial, pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, belanja modal berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Penelitian yang dilakukan oleh R. Neneng dan Nisa (2018) Berdasarkan hasil penelitian dan hasil pengolahan data menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Penelitian oleh Leni, Nugraha & Yanyan (2019) memperoleh hasil bahwa ada pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan status pemerintahan daerah dipengaruhi oleh tingkat kemandirian keuangan daerah tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Henda, Dekrita & Surya (2018) memperoleh hasil bahwa biaya modal secara parsial berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah sedangkan dana alokasi umum secara parsial berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Diana dan Marhaeni (2020) menyatakan bahwa Investasi berpengaruh positif dan tidak

signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, PDRB berpengaruh negatif signifikan terhadap belanja modal dan berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah dan PAD berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah sedangkan belanja modal berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Hamza, Rachid & Mohammed (2016) menyatakan bahwa pajak daerah terbukti paling efektif sebagai instrument keuangan sebagai pemasok anggaran masyarakat daerah untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah. Namun keberhasilan pajak daerah sendiri tidak lepas dari tata kelola, transparansi dan inovasi pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Wahab (2016) Memperoleh hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten dan Kota Provinsi Jambi. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad dan Widhi (2018) dari hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa secara silmultan terdapat pengaruh yang signifikan antara penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Bandung periode tahun 2009 – 2015. Suprihati & Kristiyanti (2018) menyatakan bahwa Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan secara simultan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah dan hal ini berarti akan meningkatkan pula kemandirian keuangan daerah.

Untuk lebih jelasnya mengenai persamaan dan perbedaan penelitian sekarang dan penelitian terdahulu dapat dilihat dalam tabel 1.2 berikut:

**Tabel 1. 2**  
**Perbedaan dan Persamaan dengan Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Perbedaan	Persamaan	Hasil	Sumber
1.	Rizka Luthfia Novalisti, (2016).  “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dan Bagi Hasil Pajak terhadap Kemandirian Keuangan Daerah”	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel Lain-lain pendapatan yang sah</li> <li>• Variabel Dana Bagi Hasil Pajak.</li> <li>• Tahun Penelitian.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel Pajak Daerah</li> <li>• Variabel Retribusi Daerah.</li> <li>• Variabel Tingkat kemandirian keuangan daerah.</li> </ul>	Pajak daerah, lain-lain PAD yang sah dan DBH berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, Retribusi daerah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Sedangkan Pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain PAD yang sah dan DBH pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.	<i>Journal Of Accounting</i> , 2 (2). ISSN: 2502-7697. Universitas Pandanaran Semarang.
2.	Endra Gunawan (2018).  “Pengaruh Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah”	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD).</li> <li>• Tahun penelitian.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel Pajak Daerah</li> <li>• Variabel Retribusi Daerah</li> </ul>	efektivitas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.	Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi (EMT). 2 (1). 2018. ISSN: 2549-6204 (Online). STIES Banda Aceh.
3.	Kurnia Rina Ariani (2010).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel Belanja Modal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel Tingkat Kemandirian</li> </ul>	Belanja modal berpengaruh signifikan	<i>Syariah Paper Accounting</i> .

	<p>“Pengaruh Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah”</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel Dana Alokasi Umum.</li> <li>• Tahun penelitian</li> </ul>	Keuangan Daerah.	<p>positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah sedangkan DAU berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Belanja modal dan DAU secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.</p>	<p>ISSN: 2460-0784. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhamadiyah Surakarta.</p>
4.	<p>Bagus Bowo Laksono dan Subowo (2014).</p> <p>“Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah”</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel Dana Alokasi Umum</li> <li>• Variabel Dana Alokasi Khusus</li> <li>• Variabel Belanja Daerah.</li> <li>• Tahun Penelitian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel Pajak Daerah</li> <li>• Variabel Retribusi Daerah</li> </ul>	<p>Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa pajak daerah, DAU, DAK berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Sedangkan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap belanja daerah. Pajak daerah, retribusi daerah, DAU dan DAK secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.</p>	<p><i>Accounting Analysis Journal.</i> 3 (4). 2014. ISSN: 2252-6765. Universitas Negeri Semarang.</p>
5.	<p>Putri Ika Sari, (2015).</p> <p>“Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel Dana Alokasi Umum</li> <li>• Variabel Dana Alokasi Khusus</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel Tingkat kemandirian keuangan daerah.</li> </ul>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat</p>	<p>Seminar Nasional Universitas PGRI Yogyakarta 2015. ISBN:</p>

	Alokasi Khusus dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah”	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel Belanja Modal.</li> <li>• Tahun penelitian</li> </ul>		kemandirian keuangan daerah, DAK berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah dan belanja modal berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.	978-602-73690-3-0.
6.	Sunarto dan Y Sunyoto (2016).  “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah yang Berdampak Pada Pertumbuhan Perekonomian Daerah”	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hanya menggunakan dua variabel independen</li> <li>• Dicari dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.</li> <li>• Tahun Penelitian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel Pajak daerah</li> <li>• Variabel Retribusi daerah.</li> <li>• Variabel Kemandirian daerah.</li> </ul>	Hasil Penelitian Pajak Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Kemandirian Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi. Retribusi Daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap Kemandirian Daerah dan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Kemandirian Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah.	Jurnal Dharma Ekonomi. No.43/ th. XXIII/ April 2016. ISSN: 0853-5205.. STIE Dharmaputra Semarang.
7.	Feni Febriayanti dan Muhammad Faris	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hanya menggunakan dua variabel independen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel Pajak Daerah.</li> <li>• Variabel Retribusi Daerah</li> </ul>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak daerah dan	Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban. 5(2).

	(2019).  “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah”	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tahun penelitian.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel Kemandirian Keuangan Daerah.</li> </ul>	retribusi daerah baik secara parsial maupun secara simultan mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian daerah..	Desember 2019. ISSN: 2597-9116 (online). Universitas Islam Lamongan.
8.	Yusuf Hafandi dan Romadhon. (2020).  “Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah”	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah</li> <li>• Variabel Pendapatan Asli Daerah</li> <li>• Tahun penelitian.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel Pajak daerah</li> <li>• Variabel Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.</li> <li>• Variabel Retribusi Daerah.</li> </ul>	Berdasarkan hasil penelitian memperlihatkan bahwa variabel pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.	<i>Journal Of Economic, Management, Accounting and Technology (JEMATEch)</i> . 3(2), Agustus 2020. E-ISSN: 2622-8122. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sains Al-Qur’an Wonosobo.
9.	Maya Novitasari, dan Lita Novitasari (2019).  “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Bagi Hasil, Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemandirian Daerah”	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel dana bagi hasil</li> <li>• Variabel Belanja modal.</li> <li>• Variabel pertumbuhan ekonomi</li> <li>• Tahun penelitian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel Pajak Daerah.</li> <li>• Variabel Retribusi Daerah.</li> <li>• Variabel Kemandirian Daerah.</li> </ul>	Hasil dari penelitian ini adalah pajak daerah, retribusi daerah, dan belanja modal berpengaruh terhadap Kemandirian keuangan daerah. Sedangkan DBH dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap Kemandirian keuangan daerah. Secara silmutan pajak daerah, retribusi daerah, DBH,	<i>INVENTOR Y: Jurnal Akuntansi</i> . 3(2) Oktober 2019. ISSN: 2613-912X (online). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Madiun.

				belanja modal, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah	
10.	Abdul Wahab (2016).  “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah terhadap Belanja Daerah”	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.</li> <li>• Variabel Belanja Modal.</li> <li>• Tahun penelitian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel Pajak Daerah</li> <li>• Variabel Retribusi Daerah.</li> </ul>	Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten dan Kota Provinsi Jambi.	Jurnal Akuntansi dan Keuangan Unja. 1(3), Januari 2016, ISSN: 2460-6235. Universitas Jambi.
11.	Renny Nur'ainy, Desfitriana, dan Rooshwan Budi Utomo (2013).  “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah”	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel Pertumbuhan Ekonomi</li> <li>• Variabel Pendapatan Asli Daerah</li> <li>• Tahun penelitian.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.</li> </ul>	Hasil penelitian pendapatan membuktikan bahwa secara parsial pertumbuhan ekonomi (PDRB) dan asli daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Secara simultan dua faktor yang terdiri dari pertumbuhan ekonomi (PDRB) dan pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.	Proceeding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur & Teknik Sipil) Vol. 5 Oktober 2013 Bandung, 8-9 Oktober 2013. ISSN: 1858-2559. Universitas Gunadarma Jakarta.
12.	Nareswari Listya Nindita	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel Pendapatan Asli Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel Tingkat Kemandirian</li> </ul>	Hasil penelitian ini menunjukkan pendapatan asli	<i>Journal Accounting and Finance</i>

	dan Sri Rahayu. (2018).  “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum serta Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Daerah”	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel Dana Alokasi Umum</li> <li>• Variabel Belanja Modal</li> <li>• Tahun penelitian.</li> </ul>	Keuangan Daerah.	daerah, dana alokasi umum, dan belanja modal berpengaruh secara simultan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.	Edisi 2(1). Maret 2018. E-ISSN 2581-1088. Universitas Telkom Bandung.
13.	R. Neneng Rina Andriani dan Nisa Noor Wahid. (2018).  “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah”	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel Pendapatan Asli Daerah</li> <li>• Variabel Dana Perimbangan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel Kemandirian Keuangan Daerah.</li> </ul>	Hasil penelitian yaitu Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan baik secara parsial maupun secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.	Jurnal Akuntansi, 13(1). 30-39. 2018 ISSN: 1907-9958. Universitas Siliwangi Tasikmalaya.
14.	Fadly Nggilu, Harijanto Sabijono, dan Victorina Tirayoh. (2016).  “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah”	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel yang digunakan hanya dua</li> <li>• Tahun penelitian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel Pajak Daerah</li> <li>• Variabel Retribusi Daerah</li> <li>• Variabel Kemandirian Keuangan Daerah.</li> </ul>	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah baik secara parsial maupun secara simultan berpengaruh positif terhadap Kemandirian keuangan daerah.	Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. 16 (4) tahun 2016. ISSN: 0853-6708. Universitas Sam Ratulangi.
15.	Muhammad Iqbal dan Widhi Sunardika (2018).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel Pendapatan Asli Daerah</li> <li>• Tahun penelitian.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel Pajak Daerah</li> <li>• Variabel Retribusi Daerah.</li> </ul>	Berdasarkan hasil tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa secara simultan terdapat	Jurnal Ilmiah Akuntansi 9(1) Januari-April 2018. ISSN: 2086-

	“Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah”			pengaruh yang signifikan antara penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Bandung periode tahun 2009 – 2015.	4159. Universitas Bale Bandung.
16	Henda Hendawati, Dekrita Komarasakti dan Surya Ansori (2018).  “ <i>The Effect Of Capital and General Allocation Fund To The Regional Financial Independence</i> ”	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Variable Capital Cost</i></li> <li>• <i>Variable General Allocation Fund</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Variable Regional Financial Independence</i></li> </ul>	Biaya Modal secara parsial berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah sedangkan dana alokasi umum berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah	<i>The International Journal Of Business Review (The Jobs Review)</i> , 1 (2), 2018. 141-149
17	Diana Yusiawati dan Marhaeni (2020).  “ <i>Effect Of Investment, GDRP, Percapita, and Original Local Government Revenue on Regional Financial Independence through Capital Expenditure as Intervening Variables</i> ”	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Variable Investment</i></li> <li>• <i>Variable PDRB Per Capita</i></li> <li>• <i>Variable Original Local Government Revenue</i></li> <li>• <i>Variable Capital Expenditure</i></li> <li>• Menggunakan variable intervening</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Variable Regional Financial Independence</i></li> </ul>	Investasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap belanja modal dan berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, PDRB berpengaruh negatif signifikan terhadap belanja modal dan berpengaruh positif	<i>International Research Journal of Management, IT &amp; Social Sciences</i> , 7 (6), November 2020, 96-108. ISSN: 2395-7492

				signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, PAD berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah sedangkan belanja modal berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.	
18	Hamza Lachheb, Rachid Bouthanoute & Mohammed Bendriouch (2016).  “ <i>For a Local Tax System Dedicated to Sustainable Development Incorporating Governments, Transparency and Innovation</i> ”	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Variable Development Incorporating Governance</i></li> <li>• <i>Variable Transparency</i></li> <li>• <i>Variable Innovation</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Variable Local Tax</i></li> </ul>	Pajak Daerah terbukti paling efektif sebagai instrumen keuangan sebagai pemasok anggaran masyarakat daerah untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah. Namun keberhasilan pajak daerah tidak terlepas dari tiga pilar utamanya yaitu tata kelola, transparansi dan inovasi.	<i>International Journal of Economic and Finance</i> , 8 (5), 2016. ISSN: 1916-9728.
19	Suprihati & Kristiyanti (2018)  “ <i>Improving Regional Original Income with</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Variable Locally-Generated Revenue</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Variable Tax Income</i></li> <li>• <i>Variable Retribution Income</i></li> <li>• <i>Variable Regional Wealth</i></li> </ul>	Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	<i>International Journal of Economic, Business and Accounting Research (IJEBAR)</i> , 2 (3), 2018.

	<i>Tax Receipt, Regional Retribution and Regional Wealth Management Result</i>		<i>Management Result</i>	secara bersama-sama mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah.	ISSN: 2614-1280.
20	Leni Yulianti, Nugraha & Yanyan Kurnia Fadilah (2019).  “ <i>The Influence of Local Own Source Revenue towards, Regional Finance Independence</i> ”	• <i>Variable Local Own-Source Revenue</i>	• <i>Variable Regional Financial Independence</i>	Berdasarkan uji secara parsial (Uji-t) dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh pendapatan asli daerah terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.	<i>Ist International Conference on Economics, Business, Enterprise ship and Finance (ICEBEF), Vol 65, 2018, ISSN: 2352-5428.</i>
	<b>ANDHINI YUNIAR ARYAWATI (2021)</b>			<b>PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH DAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH (Survey Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2019)</b>	

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan dalam latar belakang penelitian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai: “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Survey Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2019)”.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diungkapkan diatas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta tingkat kemandirian keuangan daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2019
2. Bagaimana pengaruh pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan baik secara parsial maupun simultan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2019

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta tingkat kemandirian keuangan daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2019
2. Untuk mengetahui pengaruh pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan baik secara parsial maupun simultan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2019

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

1. Bagi pemerintah daerah  
Penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui pengaruh pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Dari sini diperoleh bahan

dan masukan bagi pemerintah daerah dalam membuat kebijakan serta menentukan arah dan strategi pembangunan di masa yang akan datang.

2. Bagi peneliti

Menambah pengetahuan dan wawasan peneliti baik dalam hal penelitian maupun objek penelitian yang dalam hal ini adalah pengaruh pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

3. Bagi Pihak Lain

Dapat dijadikan sumber informasi yang dapat memberikan manfaat untuk dijadikan bahan perbandingan serta petunjuk untuk keperluan penelitian pada masalah yang sama atau penelitian lanjutan atau sebagai masukan bagi pihak lain yang membutuhkan.

## **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

### **1.5.1 Lokasi Penelitian**

Lokasi yang dipilih sebagai tempat penelitian ini adalah Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPk) melalui *website* resminya yaitu ([www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)) dan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat melalui *website* resminya yaitu (<https://jabar.bps.go.id>). Yang menyediakan berbagai sumber data yang akurat dan diperlukan dalam penelitian ini seperti Laporan Realisasi APBD seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.

### **1.5.2 Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan mulai dari bulan Oktober 2020 sampai dengan Maret 2021. Untuk lebih jelasnya disajikan tabel di lampiran penelitian.